



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 461 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/006/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 821.22/143-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 821.23/128-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-1904/BKPSDM-MPKA/800/12/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong, serta Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-1905/BKPSDM-MPKA/800/12/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Keduabelas atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/ Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
  17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
  18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
  19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/393/2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang


*C. A. H.*

Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 13, 15, 19, 32, 36, 38, 40 dan 41 pada Kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 13, 15, 19, 32, 36, 38, 40 dan 41 pada Kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Desember 2022

  
BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
- 



DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA BARANG	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
			1	2	3	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP. 19660317 199412 1 006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SARWJI, S.AP NIP.19700607 199803 1 009 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	NOVIA ARIANI, A.Mk NIP.19861117 201001 2 025 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	NOVIA ARIANI, A.Mk NIP.19861117 201001 2 025 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	MAHYUDIN NIP.19750212 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	DAH PUSPITA SARY, A.Md.Ak NIP.19860813 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	DAH PUSPITA SARY, A.Md.Ak NIP.19860813 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	SAINI NIP.19730201 199703 1 004 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMADI, A.Md.Ak NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMADI, A.Md.Ak NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	MAHFUD, A.Md NIP.19750106 201001 1 009 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP.19670518 199803 2 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	HERLINA NIP.19810731 200701 2 006 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	HERLINA NIP.19810731 200701 2 006 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	HELMYADI NIP.19710227 200701 1 010 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	SAIDILLAH NIP.19761009 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	SAIDILLAH NIP.19761009 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Perhubungan		
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
8	Dinas Lingkungan Hidup	H. SYAIFUL IKHWAN, S.IP, M.Si NIP.19640809 198602 1 003 Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	SELAMET ROMADAN, A.Md.Ak NIP.19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	SELAMET ROMADAN, A.Md.Ak NIP.19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	AULIA RAHMAN NIP.19830211 201212 1 003 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATANICE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	AHMAD RIPANI, A.Mk.Ak NIP.19820814 200901 1 012 Staf Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FADILLAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial	--	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. SURYANADIE, S.Sos, MAP NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S.AP NIP. 19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ERFANSYAH NIP.19790705 200901 1 003 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	--	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	WAHYUDI NIP. 19821120 201212 1 001 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TAUFIK RAHMAN, SE NIP. 19801001 200901 1 009 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	--	
16	Sekretariat Daerah	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI, M.Si NIP.19630129 198503 1 005 Sekretaris Daerah	SUPARDI, SE NIP.19761111 200312 1 011 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	WILDA AFRIYANI, A.Md.Ak NIP.19800409 200801 2 027 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	YUNIATI HASTUTI NOOR, SE NIP.19750613 200701 2 015 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	
18	Badan Pendapatn Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatn Daerah	FAHRURAZI NIP. 19801010 201001 1 025 Staf Fungsional Badan Pendapatn Daerah	--	
19	Inspektorat Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	RINI HAYATI, S.Sos NIP. 19780803 201001 2 009 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	
20	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	KARTIKA ALFAUZAWATI NIP.19771019 200701 1 009 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	
21	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP.19840301 200312 1 003 Camat Murung Pudak	EKA PUSPITA SARI, A.Md NIP.19880221 200904 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	

1	2	3	4	5	6
22	Kecamatan Tanta	Drs. BAHDUR HUSNI, M.AP NIP.19680707 198903 1 010 Camat Tanta	EKALINA RITA NIP.19740515 201408 2 002 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	AKHMAD SURIANSYAH NIP.19820621 200604 1 011 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
24	Kecamatan Banua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Banua Lawas	KHAIRUL FADILAH NIP.19680105 200604 1 012 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas	--	
25	Kecamatan Kelua	SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua	RADJAH NIP.19690506 200701 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	JAINUL HAKIM, S.AP NIP.19821117 201010 1 025 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	--	
27	Kecamatan Jaro	H. SUWANDI, S.Sos, M.AP NIP.19680705 198903 1 016 Camat Jaro	MUSTAFA NIP.19700515 198903 1 002 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	--	
28	Kecamatan Muara Uya	ABDUL WAHID, SE.Kp NIP.19770717 199903 1 008 Camat Muara Uya	ISMAL, A.Md NIP.19780602 201101 1 008 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	--	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, MA NIP.19880113 200701 1 001 Camat Haruai	TAJUDIN NIP.19690719 200701 1 034 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Upau	GATOT SUKMANA NIP.19790615 200701 1 026 Staf Fungsional Kecamatan Upau	--	
31	Kecamatan Bintang Ara	SURYADI, S.Sos, Kp NIP.19670414 198602 1 004 Camat Bintang Ara	HIDAYATULLAH NIP.19751025 200604 1 010 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	--	
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	NUNCI KASUMA, A.Md NIP.19831109 201001 1 018 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HAJI ADIL, A.Md. Kep NIP.19810622 200904 1 002 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HARIYANTO NIP.19740802 200701 1 016 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	--	

1	2	3	4	5	6
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 1 004 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	SOFYAN HADI NIP. 19780914 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUSWATI, SE NIP. 19770826 200906 2 001 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. HALISAH, S.AP NIP.19810419 200801 2 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP. 19651219 199603 1 001 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NOR PAJERIATI, A.Md.Ak NIP.19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	--	
38	Dinas Tenaga Kerja	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md NIP.19740702 200501 1 003 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	AHMAD RIDHA, S.Kom NIP.19920210 201903 1 012 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	--	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Pjt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP. 19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	--	WAHYU HENDRA WARDANA, S.AP NIP. 19810502 200801 1 018 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAHIRSYAH MANUAR, BA NIP.19650604 198609 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HENNY YUNIDA, S.AP NIP.19841202 200801 2 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	

BUPATI TABALONG, 7  
  
 RANANG SYAKHFIANI

*Handwritten signature*